

RENCANA KERJA TAHUNAN

**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024**



**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024**

Jl. Sunan Drajat No. 13 Kompleks Perkantoran Sumber
Telp./Fax (0231) 321775

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

RKT disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2024. Dan selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dalam rangka pencapaian kinerja Dinas.

Dengan tersusunnya RKT ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan sebagaimana mestinya, khususnya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kabupaten Cirebon secara efektif, efisien dan berkualitas.

Sumber,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON,



Drs.H. DADANG SUHENDRA, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670410 199301 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) diharapkan mampu memperkuat basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu dengan meningkatnya perekonomian daerah dalam menopang ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) merupakan skala prioritas dan menjadi urusan wajib yang tidak terpisahkan dari program pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Disamping itu juga dijelaskan bahwa fungsi dari Koperasi itu sendiri adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Selain kegiatan Perkoperasian, kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga merupakan salah satu bidang usaha yang mempunyai peran strategis dalam peningkatan perekonomian Nasional maupun Daerah dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah perlu difasilitasi pengembangannya oleh Pemerintah Daerah

untuk meningkatkan kinerja dan daya saing ekonomi Nasional maupun Daerah.

Pemberian dukungan dan intervensi pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sangat diperlukan terutama untuk memperkuat kelembagaan dan usahanya agar lebih efektif, kreatif, produktif, inovatif dan berdaya saing dengan memberikan peluang usaha yang seluas-luasnya dan memberikan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Maksud penyusunan RKT Tahun 2024 ini adalah sebagai informasi kepada publik tentang Rencana Program dan Kegiatan yang akan dijalankan pada Tahun 2024 oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, beserta indikator capaian kinerjanya yang harus diwujudkan pada tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah sebagai dasar acuan dalam proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada akhir Tahun 2024 mendatang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RKT Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sebelumnya adalah undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437 jo, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 jo, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 52 Seri E.47);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 76 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 76, Seri D.25).
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 76, Seri D.25).

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kabupaten Cirebon merupakan dinas teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon didasarkan pada

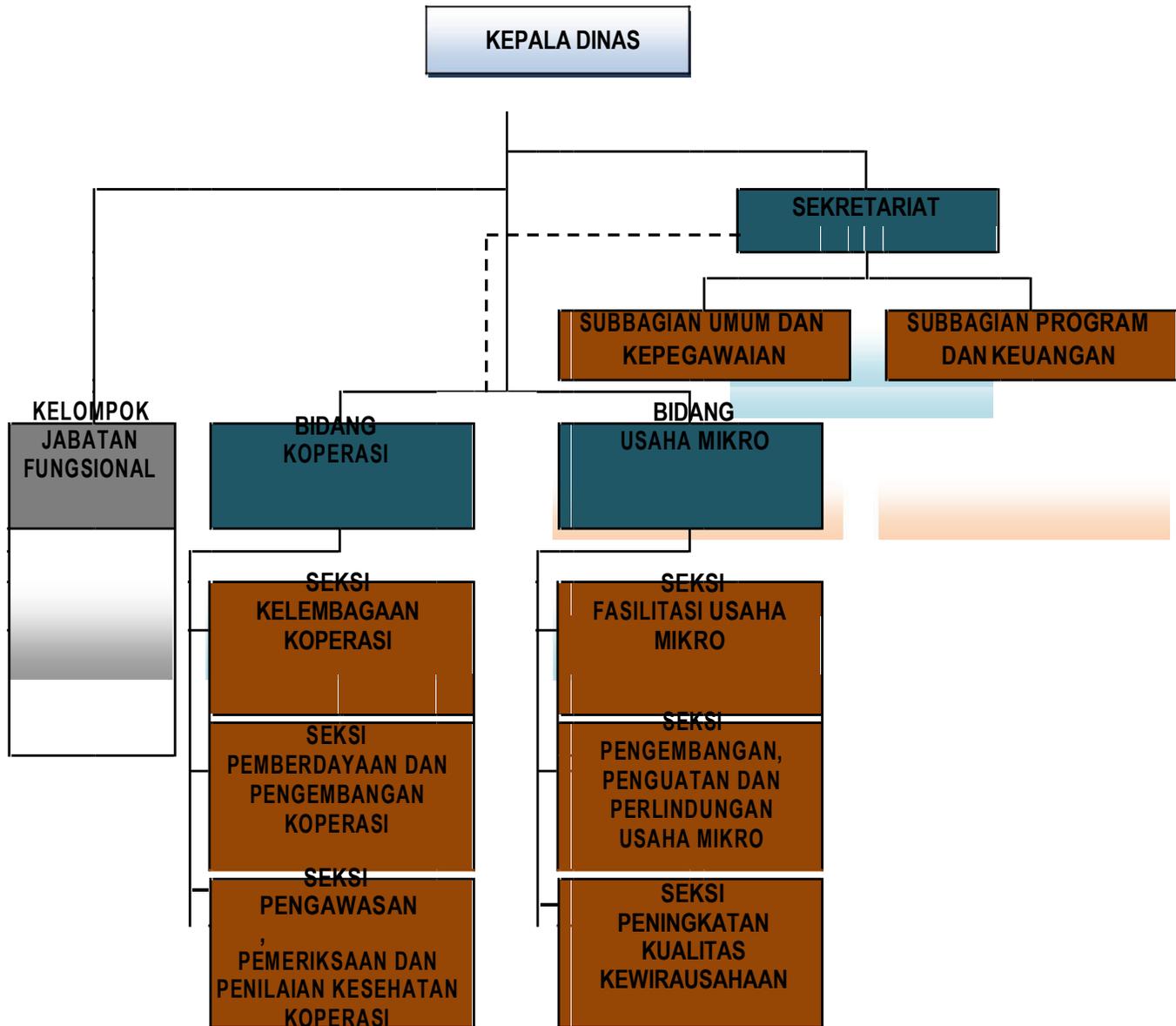
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon, Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Koperasi, membawahi:
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - c. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengawasan Kesehatan Koperasi
4. Bidang Usaha Mikro, membawahi:
 - a. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
 - b. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro.
5. Unit Pelaksana Teknis.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon



Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, bahwa setiap jabatan struktural pada Dinas Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon mempunyai tugas umum sesuai dengan ruang lingkup dinas/sekretariat/bidang/subbagian/ seksi /kelompok jabatan fungsional, meliputi:

1. Perumusan bahan perencanaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Perumusan kebijakan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Fasilitasi perizinan simpan pinjam untuk Koperasi;
4. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
5. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi;
6. Penyelenggaraan Pendidikan dan latihan perkoperasian;
7. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
8. Pemberdayaan Usaha Mikro;
9. engembangan Usaha Mikro;
10. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon didukung oleh Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Sarana Prasarana.

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon adalah kekuatan personil atau pegawai yang terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional, pelaksana, dan non PNS. Jumlah pegawai PNS sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari pria 10 (sepuluh) orang dan wanita 7 (tujuh) orang dan non PNS sebanyak 17 (tujuhbelas) orang yang terdiri dari pria 13 (dua belas) orang dan wanita 4 (empat) orang. Data pegawai PNS berdasarkan pangkat, golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1.

Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Ket.
			Pria	Wanita		
	Pembina Tingkat I	IV/b	3	-	3	
	Pembina	IV/a		1	1	
	Penata Tingkat I	III/d	3	4	7	
	Penata	III/c	1	2	3	
	Penata Muda Tingkat I	III/b	1	-	1	
	Penata Muda	III/a	-	-	-	
	Pengatur Tingkat I	II/d	1	-	1	
	Pengatur	II/c		-	1	
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b				
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	
	Jumlah		10	7	17	

Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2.
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Keterangan
		Pria	Wanita		
	Strata – 3 (S-3)		1		1
2	Strata-2 (S-2)		1	1	2
3	Strata-1 (S-1)		3	6	11
4	Akademi/D-4/D-3		1	-	1
5	SLTA		4	-	3
6	SLTP		-	-	-
7	SD		-	-	-
Jumlah			10	7	17

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, tingkat pendidikan pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 11 orang (52,17%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah secara umum.

Jabatan struktural dan fungsional, sebanyak 14 (empat belas) orang, yaitu eselon II, III dan IV, serta arsiparis. Eselon II-b sebanyak 1 (satu) orang (Kepala Dinas), eselon III-a sebanyak 1 (satu) orang (Sekretaris), eselon III-b sebanyak 2 (dua) orang (Kepala Bidang), eselon IV-a sebanyak 8 (delapan) orang (Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dan Arsiparis serta Analis Kepegawaian. Data jabatan struktural dan fungsional sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3.
Jabatan truktural
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Cirebon
Tahun

2024			
No	Jabatan Struktural	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Eselon II-b	1	
2.	Eselon III-a	1	
3.	Eselon III-b	2	
4.	Eselon IV-a	8	
5.	Arsiparis dan Analis kepegawaian	2	
Jumlah		14	

Dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon, diperlukan jumlah SDM yang memadai. Kekurangan SDM PNS dilengkapi dengan keberadaan SDM Non PNS yang membantu sebagai tenaga administrasi maupun sebagai tenaga teknis.

Sedangkan jumlah tenaga Non PNS sebanyak 17 (enam belas) orang yaitu terdiri dari Pria sebanyak 13 (tiga belas) orang, dan Wanita sebanyak 4 (empat) orang, dengan tingkat pendidikan Strata-1 (S-1) sebanyak 13 (tiga belas) orang dan SLTA sebanyak 4 (tiga) orang. Tingkat pendidikan dan jenis kelamin tenaga Non PNS sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4.
Tenaga Non
PNS
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Cirebon
Tahun
2024

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Keterangan
		Pria	Wanita		
1.	Strata-1 (S-1)	9	3	12	
2.	Akademi/D-4/D-3	1	-	1	
3.	SLTA	3	1	4	
Jumlah		13	4	17	

Sumber: Data Kepegawaian Diskopukm Kabupaten Cirebon, Oktober 2022.

Tenaga Non PNS tersebut ditempatkan di Sekretariat dan di Bidang-Bidang yang dibiayai dari APBD Kabupaten Cirebon sebanyak 12 (duabelas) orang dari anggaran APBD dan bantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI sebanyak 5 (empat) orang sarjana pendamping sebagai Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL). Penugasan tenaga Non PNS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5. Penugasan
Tenaga Non PNS

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2024					
No	Penugasan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Ket.
		Pria	Wanita		
1.	Tenaga Administrasi	2	2	4	
2.	Operator Komputer	1	2	3	
3.	Pramu Kantor	1	-	1	
4.	Penjaga Kantor	1	-	1	
5.	Tenaga Pendamping Masyarakat	2	-	2	
6.	Tenaga PPKL	5	-	5	
Jumlah		13	4	17	

Sumber: Data Kepegawaian Diskopukm Kabupaten Cirebon, Oktober 2022

Pegawai Non PNS sebanyak 17 (enam belas) atau 41,03% dari jumlah pegawai, sangat membantu dalam pemberian layanan administrasi dan pembinaan kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Cirebon.

Selain SDM PNS dan Non PNS yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, juga adanya asset/inventaris barang berupa tanah/bangunan kantor, kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kerja sebagai pendukung kelancaran dalam melaksanakan pekerjaan.

Asset/inventaris berupa tanah dipergunakan untuk bangunan kantor seluas 1.695m², terletak di Jalan Sunan Drajat Nomor 13 Sumber, yang berada di lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dan di atasnya berdiri bangunan kantor seluas 400m², terdiri dari ruang kerja, ruang tunggu, aula, dapur, toilet, kantin, dan musholla.

Sebagai dinas teknis yang mempunyai tugas melayani masyarakat secara langsung di dalam maupun di luar kantor/lapangan, maka diperlukan inventaris kendaraan dinas roda 2 maupun roda 4. Kendaraan dinas roda 4 digunakan untuk eselon II dan III sebanyak 4 (empat) unit semuanya dalam keadaan baik dan laik jalan dan 1 (satu) unit digunakan untuk operasional lapangan. Sedangkan kendaraan dinas roda 2 untuk eselon IV sebanyak 8 (delapan) unit dan 1 (satu) unit digunakan untuk operasioanl bendaharawan sedangkan 6 (enam) unit dalam keadaan kurang baik/rusak.

Peralatan dan Perlengkapan inventaris lainnya berupa peralatan dan perlengkapan kantor elektronik, non elektronik, meubeler, lemari/rak besi, dan sebagainya, yang kondisinya masih baik atau dapat dipergunakan, dan terdapat juga barang yang kondisinya kurang baik/rusak. Asset/Inventaris tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.6.
Aset/Inventaris

**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
Tahun 2024**

No	Jenis Barang	Jumlah (luas/unit)	Satuan (M ² /Unit)	Kondisi (baik/rusak)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	1,695	M ²		
2	Gedung	400	M ²		
3	Kendaraan Roda 4 / Mobil	5	Unit	5 Baik	
4	Kendaraan Roda 2 / Sepeda Motor	15	Unit	9 Baik 6 Rusak	
5	Mesin Ketik	3	Unit	3 Baik	
6	Mesin Fotocopy	1	Unit	1 Baik	
7	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	17	Unit	17 Baik	
8	Alat Kantor Lainnya	3	Unit	3 Baik	
9	Meubelair	56	Unit	56 Baik	
10	Alat Pendingin	18	Unit	18 Baik	
11	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9	Unit	9 Baik	
12	Personal Komputer	25	Unit	25 Baik	
13	Peralatan Mini Komputer	1	Unit	1 Baik	
14	Peralatan Personal Komputer	21	Unit	21 Baik	
15	Peralatan Jaringan	2	Unit	2 Baik	
16	Meja Kerja Pejabat	12	Unit	12 Baik	
17	Kursi Kerja Pejabat	5	Unit	5 Baik	
18	Lemari dan Arsip Pejabat	6	Unit	6 Baik	
19	Peralatan Studio Visual	14	Unit	14 Baik	
20	Peralatan Studio Video dan Film A	1	Unit	1 Baik	
21	Aplikasi Web SIM Koperasi	1	Unit	1 Baik	

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis Tahun 2019-2024

2.1.1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Rencana Strategis Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman (BERSAMA)”**.

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Kabupaten Cirebon BERBUDAYA
Mewujudkan masyarakat kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi dan adat.
2. Kabupaten Cirebon SEJAHTERA
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi
3. Kabupaten Cirebon AGAMIS
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika
4. Kabupaten Cirebon MAJU
Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing dipasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah
5. Kabupaten Cirebon AMAN
Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Pembinaan terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah tercakup pada Misi Kabupaten Cirebon, pada Misi ke 2 dan 4 yaitu misi Kabupaten Cirebon SEJAHTERA dan kabupaten Cirebon MAJU.

Untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Cirebon tersebut, maka pembangunan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Cirebon.

Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon merupakan penjabaran dari Misi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur Dinas;
2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi;
3. Meningkatkan sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran, dan jaringan usaha bagi KUMKM;
4. Meningkatkan daya saing KUMKM;
5. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi wirausaha baru. Berpedoman pada visi, misi dan tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, maka disusun strategi dan penjabaran strategi yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.
Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon

No.	Tujuan	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan pengetahuan Dan keterampilan aparatur Dinas	Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur	Meningkatkan pembinaan, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan aparatur Dinas melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan
2.	Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi	Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola Koperasi	Meningkatkan pembinaan, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pengelola kelembagaan koperasi melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan
3.	Meningkatkan sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran, dan jaringan usaha bagi KUMKM	Meningkatkan akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi, promosi, dan jaringan usaha bagi KUMKM	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi usaha bagi KUMKM
4.	Meningkatkan daya saing KUMKM	Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola usaha KUMKM	Meningkatkan pembinaan, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pengelolaan usaha KUMKM melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan

5.	Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi wirausaha baru	Meningkatkan kemampuan dan kapasitas bagi calon wirausaha baru	Meningkatkan Kondisi persaingan usaha yang sehat untuk Menumbuhkan Minat Pembentukan koperasi dan wirausaha baru
----	--	--	--

2.1.2. Sasaran dan Indikator Sasaran

Berdasarkan visi, misi dan tujuan tersebut diatas, maka sasaran dan Indikator sasaran pembangunan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Cirebon sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja aparatur yang bersih dan bebas KKN dengan indikator:
 - Prosentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti.
2. Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan koperasi dengan indikator:
 - Prosentase koperasi aktif.
3. Terfasilitasinya pengembangan usaha Koperasi dan UMKM dengan indikator:
 - Prosentase Koperasi dan UMKM yang mendapatkan fasilitas usaha.
4. Meningkatnya kualitas SDM pengelola KUMKM dengan indikator:
 - Prosentase pengelola KUMKM yang terlatih
5. Meningkatnya minat wirausaha baru dengan indikator:
 - Jumlah wirausaha baru

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

2.2.1. Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan

Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023, yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan prioritas kegiatan, maka Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT DINKOP UKM

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SubKegiatan :

1. Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Bahan/Material
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pengadaan Mebel
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan Mebel

B. BIDANG KOPERASI

2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Kegiatan :

a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Kegiatan :

a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Kegiatan :

a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Kegiatan :

a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Kegiatan :

a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

C. BIDANG USAHA MIKRO

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Kegiatan :

a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan :

1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
3. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
4. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
5. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

8. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan :

a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

**Program/Kegiatan Strategis Perangkat Daerah (2022-2024)
Sesuai Perubahan RPJMD 2019- 2024**

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan Strategis
	Dinas Koeperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	- Pengembangan Market Place -BDS (Business Development Centre) - Galleri UMKM -Pembentukan, Revitalisasi, dan Pembinaan KSU (Koperasi Serba Usaha) -Revitalisasi Koperasi (Menjadikan Koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi Kabupaten Cirebon)

2.2.2. Program, Kegiatan dan Anggaran

Program pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2024, yaitu:

KINERJA UTAMA

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

Program ini merupakan program rutin yang ada pada setiap SKPD. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja pada SKPD.

2. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral.

Program ini merupakan program rutin yang ada pada setiap SKPD. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem perencanaan pada SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

3. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.

Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman dalam melakukan kegiatan usaha bagi koperasi dan usaha mikro kecil menengah serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha baru.

4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha koperasi dan UMKM dengan meningkatkan modal sendiri yang berasal dari simpanan anggota, peran anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan usaha mikro kecil menengah.

5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Program ini bertujuan untuk koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro kecil menengah supaya dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi.

6. Program Peningkatan Kualitas Kelambagaan Koperasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan Koperasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi anggotanya maupun masyarakat di sekitarnya.

KINERJA PENDUKUNG

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini merupakan program rutin yang ada pada setiap SKPD. Program ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan kinerja pada SKPD.

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini merupakan program rutin yang ada pada setiap SKPD. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Aparatur akan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana berfungsi sebagai pendukung tercapainya target kinerja SKPD.

9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program ini merupakan program rutin yang ada pada setiap SKPD. Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini merupakan program rutin yang ada pada setiap SKPD. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 merupakan gambaran informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periodisasi tahun yang bersangkutan melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dokumen ini merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yang diharapkan mampu menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga target dan sasaran kinerja kegiatan dapat tercapai sesuai rencana.

Selanjutnya dokumen ini juga merupakan bahan tolok ukur pelaksanaan evaluasi kegiatan pada akhir tahun 2024, dalam meminimalisir permasalahan yang muncul serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut.

RKT tahun 2024 ini semoga dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksana program dan kegiatan Tahun 2024 di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

Sumber,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON,



Drs.H. DADANG SUHENDRA, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670410 199301 1 001



**RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

SKPD: 2-17.0-0.0-0.01. DINAS KOPERASIDAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	NON URUSAN				3.631.860.000				16.311.850.750
0.00.	NON BIDANG URUSAN				3.631.860.000				16.311.850.750
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif		100 Prosen	-			100 Prosen	-
		Prosentase Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.		87 Prosen	3.631.860.000			87 Prosen	16.311.850.750
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi daerah yang dihasilkan		5 Dok	-	PIS		5 Dok	104.500.000
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	2 Dokumen	-			0 Dokumen	-
0.00.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	2 Dokumen	-			0 Dokumen	-
0.00.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Cirebon	2 Dokumen	-			0 Dokumen	-
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Cirebon	4 Laporan	-			0 Laporan	-
0.00.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	2 Laporan	-			0 Laporan	-
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6 Dok	3.631.860.000	PIS		6 Dok	5.065.250.000
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	18 Orang	3.631.860.000	PIS		0 Orang	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	-			0 Laporan	-
0.00.01.2.02.06.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Laporan	-			0 Laporan	-
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Cirebon	2 Laporan	-			0 Laporan	-
0.00.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		1 Dok	-	PIS		1 Dok	5.000.000
0.00.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	-			0 Dokumen	-
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Teradministrasi yang Baik		18 Pegawai	-	PIS		18 Pegawai	20.500.000
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Cirebon	3 Paket	-			0 Paket	-
0.00.01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Cirebon	20 Orang	-			0 Orang	-
0.00.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Cirebon	20 Orang	-			0 Orang	-
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Penunjang Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah		1 Paket	-	PIS		1 Paket	873.075.750
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Paket	-			0 Paket	-
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Paket	-			0 Paket	-
0.00.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Paket	-			0 Paket	-
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	-			0 Paket	-
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Paket	-			0 Paket	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	3 Dokumen	-			0 Dokumen	-
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Paket	-			0 Paket	-
0.00.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	-			0 Laporan	-
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Cirebon	50 Laporan	-			0 Laporan	-
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah		10 Unit	-	PIS		10 Unit	3.975.750.000
0.00.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		5 Unit	-			0 Unit	-
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	2 Unit	-			0 Unit	-
0.00.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	3 Unit	-			0 Unit	-
0.00.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	10 Unit	-			0 Unit	-
0.00.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	10 Unit	-			0 Unit	-
0.00.01.2.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit	-			0 Unit	-
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibayarkan/dilaksanakan		3 Unit	-	PIS		3 Unit	150.000.000
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	3 Laporan	-			0 Laporan	-
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang yang Terpelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20 Unit	-	PIS		20 Unit	6.117.775.000
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		18 Unit	-			0 Unit	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Cirebon	11 Unit	-			0 Unit	-
0.00.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten Cirebon	3 Unit	-			0 Unit	-
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	11 Unit	-			0 Unit	-
0.00.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	1 Unit	-			0 Unit	-
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-				18.220.000.000
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				-				18.220.000.000
2.17.02.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Prosentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		31 Prosen	-			31 Prosen	650.000.000
2.17.02.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentasi Capaian Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten		1 Prosen	-	PIS		1 Prosen	350.000.000
		Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		25 Dok	-	PIS		31 Dok	-
2.17.02.2.01.01.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	22 Unit Usaha	-			0 Unit Usaha	-
2.17.02.2.02.	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		28 BA	-	PIS		31 BA	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.02.2.02.01.	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kotai	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	5 Unit Usaha	-			0 Unit Usaha	-
2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		40 Prosen	-			40 Prosen	2.000.000.000
2.17.03.2.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		1 Dokumen	-	PIS		1 Dokumen	2.000.000.000
2.17.03.2.01.01.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	60 Koperasi	-			0 Koperasi	-
2.17.03.2.01.02.	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Kabupaten Cirebon	55 Unit Usaha	-			0 Unit Usaha	-
2.17.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentasi Koperasi Sehat		20 Prosen	-			20 Prosen	-
		Persentase koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		17 Prosen	-			19 Prosen	1.700.000.000
2.17.04.2.01.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi hasil penilaian kesehatan yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		17 Prosen	-	PIS		19 Prosen	1.700.000.000
2.17.04.2.01.01.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kabupaten Cirebon	35 Unit Usaha	-			0 Unit Usaha	-
2.17.04.2.01.02.	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Kab. Cirebon	35 Unit Usaha	-			0 Unit Usaha	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase pengurus, pengawas, manajer dan pengelola koperasi yang bersertifikat kompetensi		35 Prosen	-			40 Prosen	-
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan Perkoperasian		50 Prosen	-			60 Prosen	2.000.000.000
2.17.05.2.01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengurus, pengawas, manajer dan pengelola koperasi yang bersertifikat kompetensi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		41,38 Prosen	-	PIS		55,17 Prosen	2.000.000.000
Kode	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kabupaten Cirebon	200 Orang	-			0 Orang	-
2.17.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Laju perkembangan usaha produktif koperasi		35 Prosen	-			40 Prosen	-
		Meningkatnya produktifitas koperasi		1,11 Prosen	-			1,37 Prosen	500.000.000
2.17.06.2.01.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase koperasi hasil Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	-	PIS		1 Dokumen	500.000.000
2.17.06.2.01.01.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Kabupaten Cirebon	25 Orang	-			0 Orang	-
2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha		4 Prosen	-			5 Prosen	-
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		3,25 Prosen	-			5 Prosen	5.370.000.000
2.17.07.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase Usaha Mikro yang Berdaya (terdata dalam ODS, memiliki izin, bermitra, terstandarisasi dan mempunyai sertifikasi produk usaha)		7 Prosen	-	PIS		10 Prosen	5.370.000.000

Sumber, 29 Pebruari 2024
KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON,



Drs.H. DADANG SUHENDRA, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670410 199301 1 001

NIP.